

HEGEMONI IDEOLOGI DALAM KONSTRUKSI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT MELAYU RIAU PADA DESAIN ARSITEKTUR

THE IDEOLOGICAL HEGEMONY IN THE CONSTRUCTION OF MELAYU RIAU COMMUNITY CULTURAL IDENTITY ON THE ARCHITECTURE DESIGN

Nina Andriana

Bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI
Widya Graha Lt. XI, Jln. Gatot Subroto N. 10 Jakarta 12710

E-mail: n.andriana@yahoo.com

ABSTRACT

This article explains the hegemony of ideology in the construction of local cultural identity on architectural design, found by using Roland Barthes' semiotic analysis. The research is qualitative with descriptive design, collated from interpretation of the data using semiotics analysis and depth interview. In its conclusion, the writer suggested that architectural design as a cultural artifact should be formed as one of the objects in political communication researches, by using cultural studies approach which shows the hegemonic practice. The need of guidelines of local cultural architectural norms to strengthen local cultural identity in architectural forms as a cultural artifact, also important thing to local government concerned.

Keywords: Ideological hegemony, Architectural design, Semiotics

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang hegemoni ideologi dalam konstruksi identitas budaya lokal pada desain arsitektur yang ditemukan dengan menggunakan kerangka analisis semiotika yang disampaikan oleh Roland Barthes. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penyajian hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan melalui interpretasi terhadap analisis semiotika dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desain arsitektur sebagai artefak budaya dapat dijadikan salah satu objek penelitian dalam penelitian komunikasi politik, dengan menggunakan pendekatan studi budaya sehingga dapat ditemukan bagaimana praktik hegemoni berlangsung dibalik kebisuan sebuah benda mati. Adalah sebuah kebutuhan yang merupakan keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk membuat pedoman dalam mempertahankan simbol-simbol budaya lokal pada desain arsitektur bangunannya.

Kata Kunci: Hegemoni ideologi, Desain arsitektur, Semiotika

PENDAHULUAN

Hegemoni ideologi berlangsung dalam berbagai ranah. Hegemoni adalah sebuah cara yang sangat samar dari seorang penguasa untuk dapat menanamkan ideologinya ke dalam benak orang-orang yang dikuasainya. Penguasaan ideologi tersebut berlangsung tanpa adanya kesadaran dari orang-orang yang dikuasai. Hal ini ditegaskan oleh Foucault bahwa sebuah negara akan dapat

dikontrol dengan baik jika sistem kebijakan yang ada dapat memiliki kekuatan dan sangat efisien dalam menguasai hampir di sepanjang wilayah kekuasaan negara tersebut.¹ Kebijakan pemerintah dalam hal tata ruang kota pada awalnya terlihat sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk membuat kota itu menjadi lebih tenang dan teratur. Namun, pada akhirnya rasionalitas pemerintah telah menguasai kehidupan masyarakat hingga ke wilayah privat.

Contoh nyata dari praktik hegemoni ini adalah praktik Ideologi Pancasila yang Bangsa Indonesia rasakan pada zaman Orde Baru. Di masa itu generasi baru tanpa sadar telah di-hegemoni oleh penguasa melalui nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan ketertiban dalam masyarakat demi tercapainya cita-cita pembangunan. Berbagai penyimpangan yang dilakukan penguasa pada masa itu dianggap sebagai hal yang wajar, dan tidak ada ruang bagi rakyat untuk dapat mengkritisi atau bahkan memprotes penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Orde Baru yang represif telah membuat semua keputusan dan kebijakan politik bersifat sentralistik. Dengan pola seperti ini, hubungan pusat daerah menjadi masalah krusial dan menciptakan masalah laten karena hegemoni pusat terhadap daerah (yang lemah) telah menciptakan situasi ketidaksetujuan pada pihak terakhir. Masa Orde Baru mempunyai arti penting bagi munculnya nasionalisme etnik di Riau, selain karena pada masa itu terjadi masalah sentralistik di mana pemerintah pusat mengatur semua kebijakan politik penting, yang ujung-ujungnya merugikan daerah, juga karena secara umum rezim Orde Baru memiliki pandangan khusus tentang etnisitas yang memengaruhi kebijakan yang diterapkannya. Dalam masalah etnisitas, rezim Orde Baru sangat merasa tabu untuk membicarakannya sehingga semua hal yang dianggap sara bukan saja tidak boleh muncul tetapi juga tidak boleh dibicarakan. Karena sikap tabu itu, kasus-kasus yang muncul akhirnya tidak pernah mendapatkan pemecahan yang maksimal. Di Riau masalah etnisitas menjadi masalah laten, karena hal ini adalah bagian dari sara.²

Masalah etnonasionalisme muncul secara mengejutkan di berbagai daerah Indonesia setelah kondisi pemerintah pusat yang kuat secara tiba-tiba berubah dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Masalah yang dulu dihindari, tiba-tiba mencuat dan memunculkan konflik yang berkepanjangan, dan bahkan berdarah seperti tercermin dalam konflik Dayak-Madura di Kalimantan Barat. Di Riau pada saat itu muncul apa yang disebut “Riau Merdeka”, suatu gerakan yang bukan saja bertumpu pada nasionalisme etnik, tetapi bahkan cenderung separatis karena ingin memisahkan diri dari NKRI. ‘Riau Merdeka’

adalah gerakan yang menekankan identitas etnis Melayu, suatu pernyataan yang seolah mengklaim bahwa Riau adalah tanah orang Melayu.² Penekanan Melayu ini kemudian dipertegas lagi dengan isu “Putra Daerah” yang dimunculkan sebagai upaya untuk lebih mementingkan orang Riau asli yang mempunyai daerah ini dalam hal, baik menunjuk pemimpin maupun mendudukkan mereka pada posisi kunci dalam masyarakat,

Selain permasalahan “Putra Daerah” di atas, salah satu bentuk nasionalisme etnik yang digalang oleh masyarakat Melayu Riau adalah dengan mengedepankan penggunaan simbol-simbol identitas budaya Melayu, seperti pakaian daerah, penggunaan bahasa Melayu pada percakapan sehari-hari dan juga arsitektur gedung milik pemerintah yang bernuansakan Melayu. Namun, hal yang mengejutkan adalah di tengah-tengah giatnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pemuka adat Melayu di daerah tersebut untuk menguatkan simbol-simbol identitas budaya Melayunya, ditemukan sebuah fenomena simbol budaya yang menyimpang cukup jauh dari filosofi nilai-nilai Budaya Melayu itu sendiri. Hal ini ditemukan pada salah satu desain arsitektur gedung milik Pemerintahan Provinsi Riau, yaitu gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Riau. Gedung ini berada di luar kelaziman gedung milik Pemerintahan Riau yang beberapa sudut struktur bangunannya merupakan adaptasi simbol-simbol pada rumah adat Melayu Riau.

Perubahan simbol-simbol budaya Melayu yang begitu kental pada bangunan ini membuat kecurigaan terhadap hegemoni ideologi dari penguasa daerah tersebut menjadi permasalahan yang cukup mengemuka. Ditambah lagi bahwa proses penyusunan desain arsitektur gedung tersebut yang bergaya cenderung modern, tidak mendapatkan dukungan dari pemuka adat Melayu Riau. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang ingin dikemukakan di sini adalah bagaimanakah hegemoni ideologi penguasa berlangsung pada penciptaan simbol-simbol budaya yang tidak mengikuti kelaziman adaptasi simbol arsitektur budaya Melayu di Riau yang telah berlangsung selama ini, yang direpresentasikan melalui simbol-simbol arsitektur pada gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Riau?

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai indikasi praktik hegemoni ideologi yang berlangsung pada penciptaan simbol-simbol budaya yang tidak mengikuti kelaziman adaptasi simbol budaya Melayu di Riau selama ini, yang direpresentasikan melalui simbol-simbol arsitektur pada gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Riau.

Memahami hegemoni tidak akan terlepas dari bagaimana memahami tentang ideologi. Ideologi sendiri menurut Lull merupakan sistem ide-ide yang diungkapkan melalui komunikasi. Namun, hal yang sering kali ditemukan dalam pembicaraan mengenai ideologi adalah, apakah ia merupakan hal yang bersifat negatif atau positif? Bagi Jorge Larraín, secara positif, ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sementara itu, secara negatif, ideologi dilihat sebagai sebuah kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas.³

Ideologi menurut Marx sesungguhnya merupakan *false consciousness* (kesadaran palsu) yang sesungguhnya sarat kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan kaum pemilik modal. Lebih jauh menurut Karl Marx, ideologi terletak di *superstructure* walaupun ideologi sebenarnya merunut dari *basic structure*. Menurut Gramsci, letak sesungguhnya dari ideologi yang telah menyebabkan kesadaran palsu bukanlah merupakan gagasan apalagi determinasi dari basis ekonomi, melainkan menyangkut tuturan kata, sikap dalam ranah keseharian Gramsci membawa ideologi pada *practical things*. Bukan lagi pada tatanan konseptual. Tidak ada lagi kesadaran partikular, kesadaran kelas. Alasan Gramsci adalah ideologi yang katakana lah membentuk kesadaran (palsu) berada pada *practical things*, yang kemudian menunjuk *popular consciousness*. *Popular consciousness* mengindikasikan bahwa kesadaran yang ada di sini adalah kesadaran populer, artinya milik semua orang tanpa memandang kelas.⁴

Dalam analisis Gramsci, ideologi dipahami sebagai ide, makna dan praktik yang kendati mereka klaim sebagai kebenaran universal, merupakan

peta makna yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu.⁵ Ideologi menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntunan moral yang sepadan dengan agama, yang secara sekuler dipahami sebagai suatu kesatuan keyakinan antara konsepsi dunia dan norma tindakan terkait. Suatu blok hegemoni tidak pernah terdiri dari kategori sosial-ekonomi tunggal, namun dibentuk melalui serangkaian aliansi di mana satu kelompok berposisi sebagai pemimpin. Ideologi memainkan peran krusial dalam membiarkan aliansi kelompok ini menanggalkan kepentingan sempit usaha ekonomi dan mengutamakan kepentingan “nasionalis-populer”.

Jadi, “satu kesatuan sosial-budaya” diperoleh melalui aneka ragam kehendak, yang tujuan utamanya secara heterogen bersama-sama dimasukkan ke dalam satu tujuan tunggal sebagai basis suatu konsepsi tentang dunia yang adil dan alamiah. Hal ini senadanya juga disampaikan oleh Foucault,⁶ bahwa ia mengidentikkan ideologi dengan kekuasaan karena baginya istilah ideologi itu sendiri dapat dipertukarkan dengan pengetahuan dan dalam pengetahuan inilah Foucault menekankan adanya kekuasaan yang melegalkan kebenaran dari pengetahuan tersebut.

Ideologi budaya di suatu daerah tentunya tidak muncul dan tumbuh begitu saja. Terdapat tangan-tangan tidak terlihat yang menciptakan atau, dapat dikatakan, melanggengkan ideologi tersebut, dan tentunya hal ini kembali bertujuan untuk menjustifikasi kebenaran kekuasaan kelompok dominan tertentu. Di sinilah praktik hegemoni itu berlangsung. Bagi Gramsci, hegemoni berarti suatu keadaan di mana suatu “blok historis” kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan, dan terlebih lagi, dengan konsensus.⁵ Hegemoni tidak bekerja pada tataran permukaan dari kesadaran masyarakat, tetapi lebih dalam lagi yaitu pada tataran ideologi yang dipahami dan dijalankan masyarakat. Karena itulah, sangat penting untuk membongkar ideologi yang menghegemoni tersebut.

Lalu ideologi seperti apa yang hendak dibangun oleh kelompok dominan yang ada di Provinsi Riau ini, seperti yang tergambar dalam identitas budaya melalui artefak desain arsitektur Pusda Riau yang mereka bangun. Selanjutnya,

siapakah kelompok dominan yang menghegemoni ideologi budaya tersebut. Meskipun bukan hal yang mudah untuk dapat membongkar sebuah hegemoni ideologi dalam budaya, hal ini tetap akan penulis lakukan, mengingat kesadaran palsu yang dibangun oleh kelompok dominan terhadap masyarakat Riau ini dapat memberikan pengaruh yang besar pada arah pembentukan identitas masyarakat Melayu yang ada di Provinsi Riau.

Selanjutnya, untuk dapat menemukan praktik hegemoni ideologi dalam simbol-simbol arsitektur yang menjadi objek kajian ini haruslah digunakan konsep yang berhubungan dengan pemaknaan tanda yang diperlihatkan terhadap simbol-simbol tersebut. Suatu ilmu yang mempelajari pemaknaan tanda ini dikenal dengan semiotika. Karena itulah sangat penting untuk meletakkan penjelasan semiotika ini secara teoretis dalam bab konseptual ini. Semiotika sebagai bagian dari metode yang berawal dari disiplin ilmu linguistik dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai metode, tetapi juga harus dipahami bahwa ia merupakan sebuah konsep teoretis yang berkaitan dengan persoalan “tanda”.

Semiotika adalah sebuah teknik penafsiran atau pemaknaan teks yang berasal dari kajian bahasa, merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Tanda menurut Eco didefinisikan sebagai sesuatu yang terbangun atas dasar konvensi sosial sebelumnya yang dapat dianggap mewakili sesuatu yang lainnya.⁷

Selanjutnya, Berger menyatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, makna tanda, dan cara kerja tanda.⁸ Sebagian tanda dapat dipahami secara alami, Artinya terdapat hubungan alami (natural) antara tanda dan artinya, seperti adanya teriakan pada orang yang kesakitan. Namun, sebagian besar dari tanda-tanda yang dimanfaatkan untuk komunikasi antarmanusia perlu dipelajari dan berdasarkan hasil konvensi, contoh yang paling jelas adalah simbol. Didasarkan pada definisi yang disampaikan Eco, bahwa semiotik tidak hanya mempelajari tanda yang sehari-harinya ditemukan dalam percakapan. Dalam semiotik, tanda ada dalam wujud kata-kata, gambar, suara, bahasa tubuh, dan objek.

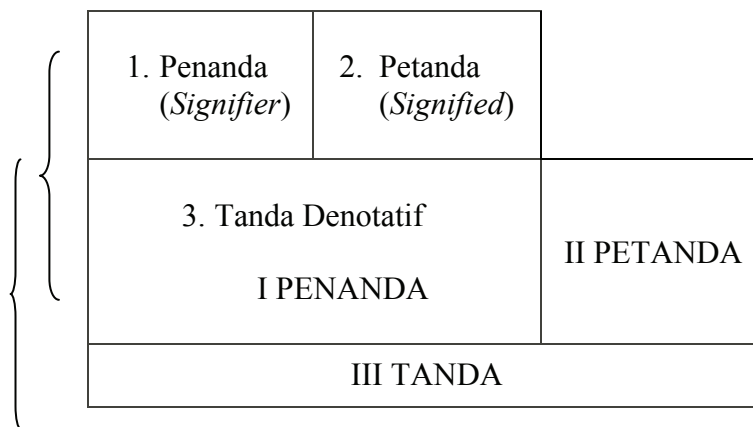
Jadi tanda yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berbagai simbol yang ditemukan dalam artefak struktur bangunan Pusda Riau yang kemudian akan ditemukan makna denotasi dan konotasinya, yang selanjutnya sesuai dengan pemahaman semiotika signifikasi, akan ditemukan hubungan yang jelas antara *signifier* dan *signified* dari tanda itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui pemaknaan dari berbagai tanda tersebut akan ditemukan wujud mitos yang mengarah pada representasi identitas budaya yang diperlihatkan. Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya simbol ataupun tanda bukan sesuatu hal yang diam melainkan sesuatu yang mengomunikasikan atau menyampaikan pesan dari si pembuat kepada si penikmat.

Melalui desain arsitektur akan didapat pengetahuan mengenai ide atau pemikiran dasar yang melandasi sikap atau tingkah laku dan budaya materi yang dihasilkan (termasuk karya desain), yang berasal dari sistem budaya pembuat atau pengguna desain. Selanjutnya, pengetahuan tentang ideologi tersebut dapat dipergunakan untuk merepresentasikan identitas dalam karya desain tanpa harus terpaku pada kode-kode langgam bentuk.⁹

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah hasil dari sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didasarkan pada data sekunder dan primer yang ada. Data primer di sini adalah desain arsitektur gedung perpustakaan daerah Provinsi Riau dan data primer adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perancangan desain arsitektur ini. Metode analisis data yang dilakukan pada tahap awal adalah analisis semiotika dengan menggunakan kerangka analisis yang disampaikan oleh Barthes, sebagai langkah awal untuk membongkar nilai-nilai budaya Melayu yang bergeser pada simbol-simbol desain arsitektur perpustakaan. Kerangka tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.⁹

Selanjutnya dilakukan proses interpretasi data terhadap hasil pemaknaan dan wawancara mendalam yang akan disajikan secara narasi.



Gambar 1. Kerangka analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitos identitas budaya yang terbongkar melalui analisis semiotika yang dilakukan terhadap beberapa simbol arsitektur gedung perpustakaan daerah Provinsi Riau lebih merujuk kepada identitas budaya modern. Banyak simbol-simbol budaya Melayu tradisional yang memudar makna filosofisnya ketika diadopsi pada gedung dengan desain yang sangat futuristik ini. Beberapa simbol yang nilai filosofinya memudar tersebut di antaranya:

- 1) Tiang miring yang menopang bagian ujung atap perpustakaan yang menurut perancang mengadopsi semangat selembayung. Selembayung adalah simbol identitas budaya Melayu pertama yang diteguhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau demi memperlihatkan refleksi kecerahan Melayu pada bangunan-bangunan milik pemerintahnya. Selembayung dalam makna filosofis Melayu merefleksikan makna kehormatan atau kedudukan sosial. Pada bangunan tradisional Melayu, tidak sembarang keluarga dapat menempatkan selembayung pada perabang atap rumahnya. Namun, ketika tiang miring pada bagian ujung atap perpustakaan ini disebut menyalahi aturan dalam tata struktur selembayung, perancang berdalih bahwa ini adalah bagian dari adopsi pemikiran yang terbuka terhadap perubahan, yang lebih memandang selembayung tidak harus memiliki hiasan yang rumit seperti yang selama ini ada. Perancang kemudian

memotong selembayung menjadi dua bagian. Hiasan berupa ukiran dan warna kuning sebagai lambang kekuasaan menjadi hilang. Makna filosofis kehormatan yang tinggi yang direfleksikan oleh selembayung di sini menjadi hilang sama sekali. Simbol ini justru memperlihatkan tunduknya budaya lokal terhadap budaya modern.

- 2) Tiang bulat disebut oleh perancang sebagai simbol kebulatan tekad dalam menggapai cita-cita masyarakat Riau yang adil dan sejahtera serta bentuk kebulatan mufakat yang menjadi ciri nilai musyawarah yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Melayu Riau. Nilai musyawarah adalah sebuah makna filosofis tinggi yang dimiliki masyarakat Riau. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan nilai-nilai yang tersirat dalam proses pembangunan rumah tradisional Melayu Riau yang mana untuk membangun sebuah bangunan mereka harus mengadakan suatu musyawarah dengan semua tokoh adat dan agama untuk membicarakan rencana tersebut. Refleksi ini juga terlihat dari luasnya ruangan yang dimiliki oleh rumah tradisional Melayu agar dapat digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Hal ini dikarenakan masyarakat Melayu biasa mengadakan musyawarah untuk memutuskan berbagai persoalan hidup mereka. Namun filosofi ini menjadi luntur dalam perjalanan pembangunan gedung perpustakaan ini. Tidak pernah tercipta sebuah

musyawarah yang semestinya, antara pemerintah provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau walaupun tokoh-tokoh adat Melayu tersebut dipanggil oleh gubernur, bukan dalam posisi “dengar pendapat”, tetapi hanya sebagai pihak yang secara adat harus diberitahu. Mengingat gedung ini adalah milik publik sudah selayaknya musyawarah tersebut dapat diciptakan. Kembali di sini nilai filosofis masyarakat Melayu menjadi terabaikan.

- 3) Warna dominan yang digunakan pada gedung ini adalah abu-abu atau perak. Warna ini adalah warna dominan yang biasanya digunakan dalam arsitektur modern. Hal ini sangat berbeda dengan penggunaan warna-warna merah, kuning, dan putih yang umumnya digunakan pada bangunan-bangunan milik pemerintah sebagai salah satu ciri arsitektural budaya Melayu yang sangat kaya akan perpaduan warna sehingga kecirian Melayu yang kaya dan beraneka ragam tersebut menjadi hilang, dengan disatukan dalam dua pilihan warna saja yaitu abu-abu dan coklat.
- 4) Nilai budaya keramah-tamahan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau pun direpresentasikan memudar dari tata letak gedung perpustakaan. Letak gedung yang terlalu dekat dengan jalan raya yang mengelilingi gedung tersebut merefleksikan sebuah keangkuhan dari perancang dan pemilik ide desain gedung. Ketinggian gedung yang sangat menjulang tinggi juga membuat nilai estetika berupa perhatian yang besar terhadap harmonisasi yang indah antara gedung ini dengan tata ruang terhadap gedung-gedung disekelilingnya merefleksikan sikap yang tidak ramah dari gedung perpustakaan tersebut.
- 5) Munculnya nilai individualistis sebagai salah satu ciri masyarakat modern juga dapat ditemukan pada proses awal perumusan ide rancangan gedung ini. Gubernur Riau yang mendapatkan gelar Datuk Siti Amanah sebagai pimpinan adat tertinggi kaum Melayu Riau selayaknya memperhatikan unsur musyawarah dalam berbagai kebijakannya. Mengingat desain bangunan yang sangat

fenomenal selayaknya Gubernur melakukan dengar pendapat dengan para tokoh adat Melayu yang ada di Riau. Namun sayang, filosofi nilai musyawarah tersebut diabaikan olehnya.

Pergeseran nilai-nilai filosofis yang ditemukan di atas merupakan akibat tidak langsung dari nilai keterbukaan yang dianut oleh masyarakat Melayu Riau. Hal ini senada dengan nilai filosofis tata ruang dalam rumah tradisional Melayu yang terbuka terhadap tamu-tamunya dan juga berdasarkan penjelasan nilai-nilai filosofis masyarakat Melayu Riau yang telah dijelaskan sebelumnya.

Melalui desainnya yang geometrik, dengan warna dominannya adalah perak, mengaburkan langgam lokal, tata ruang luar gedung dengan lingkungannya yang angkuh serta proses perumusan ide pembangunan gedung yang mengabaikan filosofi kebersamaan dalam musyawarah dan lebih mengedepankan hitungan rasional sebagai ciri dari identitas budaya modern. Pemerintah secara implisit ingin menyampaikan bahwa tema atau mitos sentral dari berbagai simbol arsitektur modern yang telah peneliti sebutkan di atas adalah wujud filosofi nilai keterbukaan untuk menerima budaya lain sebagai salah satu ciri identitas budaya Melayu yang dimiliki oleh masyarakat Riau.

Arsitektur modern pada desain gedung ini hendak merepresentasikan bahwa masyarakat Riau sangat terbuka untuk beradaptasi dengan budaya-budaya di luar budaya Melayu yang mereka miliki selama ini, khususnya dengan budaya modern yang ditemukan lewat simbol-simbol arsitektur yang ada pada gedung perpustakaan Soeman H.S. Melalui itu pula masyarakat Melayu Riau ingin dilihat sebagai masyarakat yang telah mengalami peradaban yang modern dan tidak tertinggal dari beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia.

Namun, hal yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa nilai keterbukaan yang direpresentasikan lewat simbol-simbol arsitektur gedung tersebut dalam proses adaptasi budaya Melayu dengan budaya modern di sini telah menimbulkan penghilangan langgam lokal (Melayu). Hal ini membuat nilai keterbukaan yang dimiliki ma-

syarakat Melayu Riau yang tadinya bisa dianggap sebagai nilai lebih masyarakat Riau, tanpa mereka sadari justru menjadi bumerang bagi eksistensi identitas budaya mereka sendiri. Identitas mereka sebagai masyarakat Melayu dengan nilai keterbukaannya, justru membuat nilai-nilai filosofi Melayu lainnya seperti: nilai keramahtamahan, kebersamaan dalam musyawarah, penghormatan dalam penempatan ornamen Melayu menjadi terabaikan.

Riau dalam pandangan ekonomi, merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang geliat pertumbuhan perekonomiannya menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini didorong oleh berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan pada tiap-tiap daerah untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang mereka miliki sehingga akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mereka miliki.

Pembangunan ekonomi di Riau sangat ditunjang oleh aktivitas perekonomian dan juga investasi dari pengusaha, baik dalam maupun luar negeri. Karena itulah Riau harus menampilkan sebuah wajah yang ramah dan keterbukaan terhadap pendatang/perantau yang hendak berinvestasi di daerahnya. Wajah keterbukaan inilah yang peneliti temukan dalam pemaknaan berbagai simbol modernitas pada arsitektur gedung-gedung milik pemerintah yang ada di Riau saat ini seperti arsitektur Gedung Bank Indonesia cabang Riau, Perpustakaan Soeman H.S., gedung kantor gabungan dinas Provinsi Riau. Nilai keterbukaan ini sangat penting untuk memberi kesan yang ramah terhadap pelaku-pelaku bisnis yang hendak bertandang ke Riau.

Jargon “nilai keterbukaan” inilah yang tanpa disadari oleh masyarakat Melayu Riau telah berhasil menyusupkan nilai-nilai budaya modern dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Melayu Riau. Modernitas telah berhasil menancapkan taring-taringnya dalam budaya material masyarakat Melayu Riau. Pembeneran terhadap kewajaran masuknya nilai-nilai modern sebagai akibat dari globalisasi dilakukan dengan terus menanamkannya dibenak masyarakat Melayu Riau, bahwa mereka adalah masyarakat dengan identitas budaya yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan. Dalam artian Melayu tidak pernah

bersifat kaku dan apatis terhadap budaya lain dan menerima dengan terbuka pengaruh dari budaya lain lewat proses interaksi yang terjadi. Jadi perubahan sebagai akibat adaptasi itu dianggap sebagai hal yang wajar.

Simbol-simbol modernitas di sini tidak dilakukan dengan sebuah dominasi, dalam artian tidak melalui pemaksaan fisik dan regulasi, Tetapi justru melalui simbol-simbol yang dihasilkan oleh budaya lewat desain arsitektur yang merupakan aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena dalam regulasi yang dimiliki masyarakat Riau hingga saat ini, justru Perda yang ada mewajibkan semua unsur dan produk budaya yang ada di Riau haruslah berlandaskan pada nilai-nilai budaya Melayu yang merupakan identitas budaya masyarakat Riau.

Akan tetapi justru dengan sebuah konsensus terhadap filosofi nilai keterbukaan yang menjadi identitas budaya masyarakat Melayu Riau, nilai-nilai modern menjadi sangat mudah diterima dengan wajar oleh masyarakat Riau. Mereka tidak sadar bahwa kewajaran yang mereka yakini itu akan sedikit demi sedikit menggerus identitas budaya Melayu yang mereka terus pertahankan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Hegemoni ideologi tidak hanya melalui simbol-simbol budaya yang ada pada media massa, yang selama ini menjadi produk yang dekat dengan keseharian masyarakat. Lewat media simbol desain arsitektur pun hegemoni ideologi dapat disusupkan karena arsitektur pun merupakan bagian dari keseharian kita, tempat manusia beraktivitas dan berinteraksi. Hegemoni ideologi menciptakan sebuah kesadaran palsu melalui sebuah konsensus dalam bentuk kewajaran terhadap perubahan-perubahan simbol budaya yang terjadi pada berbagai produk budaya, seperti artefak budaya desain arsitektur.

Setiap harinya, masyarakat akan mengonsumsi berbagai gaya hidup dan pola pikir yang disiratkan dalam desain arsitektural. Jika hal ini telah teresapi dengan baik, ideologi tersebut akan tertanam jauh di bawah alam sadar masyarakat yang mengonsumsinya dan menjadikan itu sebagai bagian dari diri mereka. Ideologi ini akan menjadi negatif jika dilakukan dengan konsensus-

konsensus yang menanamkan kesadaran palsu pada masyarakat. Perubahan budaya dianggap sebagai hal yang wajar, mengingat arus globalisasi yang menciptakan arus informasi. Jika perubahan ini tidak diikuti, masyarakat takut dikatakan berada dalam lingkungan ideologi budaya yang konvensional.

Dengan temuan data dan hasil interpretasi yang dilakukan pada bab pembahasan, realitas yang peneliti temukan di sini adalah adanya hegemoni ideologi budaya modern dengan dalih filosofi nilai keterbukaan dan dipraktikkan melalui “kepemimpinan” intelektual (pimpinan politik), di mana warga Riau sangat percaya bahwa Rusli Zainal adalah pemimpin yang visioner dan selalu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Lalu kepemimpinan moral (pemimpin kaum adat), gelar Datuk Siti Amanah yang disematkan padanya diyakini (kesadaran palsu) oleh kaum adat Melayu di Riau akan membuat sang gubernur tetap berpegang pada nilai-nilai budaya Melayu.

Pengaburan filosofi nilai budaya lokal dalam adaptasi simbol-simbol artefak sebagai produk budaya pada objek kajian ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran keseriusan penguasa selama ini dalam memelihara identitas budaya lokal di daerahnya. Secara tersembunyi penguasa justru menyusupkan nilai-nilai budaya modern dalam salah satu kebijakannya. Bentuk penyusupan nilai-nilai tanpa adanya pemaksaan secara fisik inilah yang mengindikasikan terjadinya hegemoni ideologi budaya modern dari penguasa daerah yang dikhawatirkan nantinya akan mengaburkan nilai-nilai budaya lokal di daerah itu sendiri. Dalam hal ini, “nilai keterbukaan” dijadikan sebagai pembenaran terhadap perubahan nilai-nilai budaya lokal.

Perubahan ideologi budaya konvensional menuju ideologi budaya modern dalam hal ini tidak berarti menciptakan sebuah kelompok budaya baru atau justru menghilangkan kelompok budaya yang sebelumnya telah ada. Namun, jika kelompok budaya konvensional tidak memiliki kekuatan yang besar untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka miliki bukan tidak mungkin budaya tradisional hanya akan menjadi sebuah cerita yang hanya akan ditemukan dalam catatan-catatan sejarah yang akan sulit ditemukan dalam bentuk-bentuk produk budaya yang konkret.

SARAN

Melalui temuan yang didapat dari penelitian ini, secara akademis penulis hendak menyarankan bahwa pengembangan teori hegemoni ideologi itu sangatlah luas. Sebuah desain arsitektur pun tidak menghalangi para penguasa untuk dapat menanamkan ideologinya. Untuk Indonesia, sebaiknya kajian-kajian yang melihat sisi lain dari hegemoni ideologi ini harus terus dilakukan. Jika selama ini kajian hanya berputar-putar pada peran media massa dan regulasi-regulasi dan program pembangunan yang penuh dengan kamufase dalam memperlancar hegemoni tersebut, mungkin akan cukup bijak untuk lebih mampu membongkar hegemoni ideologi itu pada benda-benda bisu yang tidak menggunakan bahasa verbal dalam mentransferkan hegemoni ideologi budaya tersebut.

Banyak sekali media yang digunakan oleh penguasa dalam membenarkan segala tindakannya yang dianggap sebagai sebuah usaha membangun bangsa. Namun, di Indonesia praktik pembongkaran hegemoni dalam media artefak (budaya) masih sedikit dilakukan. Juga akan lebih baik jika kajian mengenai hegemoni ideologi ini mampu menampilkan sisi lain dari hegemoni ideologi tersebut, yaitu yang selama ini cenderung negatif dengan menanamkan kesadaran palsu menjadi yang lebih cenderung positif dengan menanamkan kesadaran untuk memperbaiki kualitas hidup manusia itu sendiri.

Pemerintah di daerah selayaknya harus lebih bijak dalam menerapkan semua gagasan-gagasan yang dibangunnya. Kepentingan politis yang selama ini selalu berada di atas kepentingan pemeliharaan identitas budaya lokal, sudah seharusnya memberikan ruang yang layak dan terhormat bagi pemeliharaan identitas budaya lokal itu. Hal ini dikarenakan pemeliharaan identitas budaya lokal yang baik akan mampu memelihara budaya kecintaan dan penjagaan yang tinggi dalam diri masyarakat lokal terhadap produk budaya yang mereka miliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tiada terhingga dan terhentinya rasa syukur ini dihaturkan untuk Mu Sang Maha Memberi. Di sini penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Prof. Dr. Dwi Purwoko yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih juga untuk Dr. Muhammad Hisyam yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan saran dalam presentasi karya tulis ini. Tidak lupa untuk Arie Widjayanto yang telah meluangkan waktu membaca dan memberikan saran dalam perbaikan tata bahasa yang baik dan benar dalam tulisan ini. Terima kasih yang tidak terlupakan untuk teman-teman satu bimbingan, Yogi, Bang Ulil, Ayu, dan Mbak Ana.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Rabinow, P. (ed). 1984. *The Foucault Reader, An Introduction to Foucault's Thought with Major New Unpublished Material*. Berkeley: Penguin Books.
- ²Santoso, W. M. Nasionalisme Etnis di Riau Pasca Orde Baru. (<http://www.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../5660/5661.pdf>).
- ³Sunarto. 2001. *Analisis Ideologi Gender Media Anak-anak*. Semarang: Diterbitkan atas Kerjasama Penerbit Mimbar dan Yayasan Adikarya Ikapi serta Ford Foundation.
- ⁴Santoso, L. dkk. 2003. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar Ruuz Media.
- ⁵Barker, C. 2004. *Cultural Studies, Theory and Practice*. London: Sage Publications, Ltd.
- ⁶Horrocks, C. dan Z. Jevtic. 1997. *Mengenal Foucault, For Beginners*. (terj.). Jakarta: Mizan.
- ⁷Eco, U. 1979. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- ⁸Berger, A. A. 2005. *Media Analysis Techniques*, (3rd Edition). California: Sage Publications, Inc.
- ⁹Tjahjono, G. 2005. Kajian Semiotik dalam Arsitektur. Dalam Masinambow, E.K.M dan R. S. Hidayat. 2001. *Semiotik Mengkaji Tanda dalam Artifak*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ¹⁰Barthes, R. 2007. *Membedah Mitos-mitos Budaya Massa, Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol dan Representasi*. Yogyakarta: Jalasutra.

